

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN  
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA  
JASA KEUANGAN**

**(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

**FATMAWATI  
NPM.1551020030**



**Program Studi Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H /2021M**

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN  
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA  
JASA KEUANGAN**

**(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

**FATMAWATI  
NPM.1551020030**

**Jurusan: Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A.,M.Ec.Dev**

**Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M.Acc**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

**Oleh :  
Fatmawati**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Literasi dan Inklusi keuangan telah menjadi salah satu jenis kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2019 hasil Survei Nasional yang menunjukkan indeks Literasi keuangan Indonesia sebesar 38,03% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 76,19%. Menurut hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Provinsi, Lampung termasuk Literasi dan Inklusi Keuangan yang cukup rendah yaitu tingkat Literasi sebesar 30,97% dan Inklusi Keuangan sebesar 61,94%.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan .

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dan sifat penelitiannya adalah Deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini bagian datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yaitu mencakup dalam Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan dan Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati  
NPM : 1551020030  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syari'ah Bisnis Islam)  
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Juni 2021

**Penulis,**

**Fatmawati**

**1551020030**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi : ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI DAN  
INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT  
TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN**

**Nama : Fatmawati**  
**NPM : 1551020030**  
**Jurusan : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

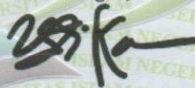
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

  
**Vitria Susanti, M.A.M.Ec.Dev**  
**NIP. 197809182005012005**

**Pembimbing II,**

  
**Yetri Matrika Sari, M.Acc**  
**NIP. 198403282018012001**

**Ketua Jurusan,**

  
**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarama Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan” disusun oleh Fatmawati, NPM: 1551020030, Program studi Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 28 Juni 2021.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Nasruddin, M. Ag.

**Sekretaris** : Ahmad Hazas Syarif, S.E., M.E.I.

**Penguji I** : Fatih Fuadi, M.Si

**Penguji II** : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev

**Penguji III** : Yetri Martika Sari, M.Acc

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si**

NIP. 196008012003121001

## MOTTO

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ  
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

Artiya : “Bacalah kitabmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi perhitungan terhadap dirimu (tentang segala yang akan engkau lakukan).” QS.AL Isra’ : 14

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah...

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberi nikmat-Nya. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis persembahkan dan dedikasikn sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Bunda dan Ayah Tercinta Nurlela dan Suparno, Kakak Ratna Sari S.Pd, Farid Dudin, Puji Astuti dan Rizky Afrizal, Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi kampus tempatku menimba ilmu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Fatmawati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 November 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Nurlela. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandar Lampung selesai tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Nusantara Bandar Lampung selesai tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Perintis 2 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 7 Juni 2021  
Yang Membuat,

Fatmawati

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hinayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN”.(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).

Shalawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yaitu agama islam.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa penulis tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Vitria Susanti Selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yetri Matrika Sari Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat penulis amalkan.
5. Bapak Didi Kalnadi dan Bapak Dwi yang telah memberikan iziinya dalam penelitian dan memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika fakultas.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Dan penulis mohon maaf atas kekurangan dan kepada Allah Swt penulis mohon ampun.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka .....	7
H. Metode Penelitian.....	9

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	14
2. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	16
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan .....	16
4. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan.....	17
B. Literasi Keuangan	
1. Pengertian Literasi Keuangan.....	18
2. Dasar Literasi Keuangan .....	20

3. Tingkat Literasi Keuangan .....	20
4. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan.....	21
5. Prinsip Dasar Literasi Keuangan .....	21
6. Tujuan Literasi Keuangan .....	22
7. Kelompok Sasaran Literasi Keuangan dalam SNLKI.....	22
C. Inklusi Keuangan	
1. Pengertian Inklusi Keuangan .....	27
2. Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan .....	28
3. Indikator Keuangan Inklusif .....	29
D. Lembaga Jasa Keuangan	
1. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan.....	31
2. Jenis-jenis Lembaga Jasa Keuangan.....	31

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Berdirinya OJK di Provinsi Lampung .....	33
2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan .....	33
3. Struktur Organisasi OJK Provinsi Lampung .....	34
4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	35
B. Hasil Wawancara Mengenai Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan .....	37
C. Manfaat dari Diaturnya Literasi dan Inklusi Keuangan.....	42

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Data Penelitian	
1. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan.....	45

2. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan.....	52
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Prespektif Islam.....	61

#### B. Temuan Penelitian

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan .....	63
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	70
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Hasil Survei Nasional Literasi inklusi keuangan (SNLIK) Provinsi Pada Tahun 2019 .....	4
3.1 Hasil Survei Nasional Literasi inklusi keuangan (SNLIK) Provinsi Pada Tahun 2016-2019.....	39
3.2 Hasil Survei Nasional Literasi inklusi keuangan (SNLIK) Provinsi Pada Tahun 2016-2019.....	41



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1.Struktur Organisasi Kantor OJK Provinsi Lampung .....	34
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membahas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul dalam skripsi ini berjudul “Analisis Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kantor OJK Provinsi Lampung)”. Istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Peran** adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang.<sup>2</sup>
3. **OJK (Otoritas Jasa Keuangan)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam jasa keuangan.
4. **Literasi Keuangan** adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (*On-line*), tersedia di :<https://kbbi.kemdikbud.go.id> (09 Mei 2019).

<sup>2</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi)* Ct.9 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

<sup>3</sup>Manurung, Adler H, Riky, Lutfi T, “*Succesfull Financial Planner; A CompleteGuide*.” (Jakarta: Garsindo 2000).

5. **Inklusi Keuangan** adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.<sup>4</sup>
6. **Lembaga Jasa Keuangan** lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Literasi dan inklusi keuangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini karena literasi dan inklusi keuangan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 mengatakan bahwa dengan semakin tingginya indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia maka akan mengakibatkan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dari resiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu, masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.<sup>6</sup> Pada tahun 2019 dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan rendahnya pemahaman

---

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Presiden Pimpin Langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

<sup>5</sup>Totok Budisantoso, SigitTriandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 5.

<sup>6</sup>OECD.(2016).PISA 2015 *Assesment and Analytical Framework Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy*, PISA, OECD Publishing, Paris. (SNLKI ,2017).

terhadap produk atau layanan jasa keuangan ini mengakibatkan keberagaman pengguna produk keuangan masyarakat masih belum merata disetiap lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga pengawasan perbankan baru di Indonesia. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya. Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Sesuai dengan ayat Alquran yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah [5] : 1)

Literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya literasi dan inklusi keuangan juga dibahas dalam *Organisation for Economic Co-*

*operation and Development* pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa inklusi keuangan, literasi dan perlindungan konsumen telah diakui sebagai terjalannya kesinambungan dalam mengejar stabilitas keuangan.<sup>7</sup>

Pada tahun 2019 hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK memperlihatkan bahwa indeks Literasi keuangan literasi di Indonesia sebesar 38,03% dan Indeks inklusi sebesar 76,19%.<sup>8</sup> Menurut data Bank Dunia, Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1.**  
**Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)**  
**Provinsi Pada Tahun 2019**

No.	Provinsi	Tingkat Literasi Keuangan	Tingkat Inklusi Keuangan
1.	Aceh	44,36%	86,09%
2.	Sumatera Utara	37,96%	93,98%
3.	Sumatera Barat	34,55%	66,75%
4.	Riau	43,19%	86,39%
5.	Jambi	35,17%	64,83%
6.	Sumatera Selatan	40,05%	85,08%
7.	Bengkulu	34,12%	85,56%
8.	Bangka Belitung	35,70%	64,57%
9.	Lampung	30,97%	61,94%
10.	Kepulauan Riau	45,67%	86,39%
11.	DKI Jakarta	59,16%	94,76%
12.	Jawa Barat	37,43%	88,48%
13.	Jawa Tengah	47,38%	65,71%
14.	DI Yogyakarta	58,53%	76,12%

---

<sup>7</sup>Atkinson, A. And F. Messy, "Promoting financial inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice", *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, (Oecd Publishing, 2013).

<sup>8</sup>Dwi KrisnoYudi Pramono, "Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan" *Wawancara*, 22 September 2020.

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, peluncuran OJK Proksi: Survei Bank Dunia, 2014.

15.	Jawa Timur	48,95%	87,96%
16.	Banten	39,27%	84,29%
17.	Bali	38,06%	92,91%
18.	Nusa Tenggara Barat	34,65 %	62,73%
19.	Nusa Tenggara Timur	27,82%	60,63%
20.	Kalimantan Barat	36,48%	75,33%
21.	Kalimantan Tengah	37,01%	74,80%
22.	Kalimantan Selatan	36,22%	74,54%
23.	Kalimantan Timur	39,63%	92,39%
24.	Kalimantan Utara	35,43%	65,09%
25.	Sulawesi Utara	38,85%	83,99%
26.	Sulawesi Tengah	39,63%	65,09%
27.	Sulawesi Selatan	32,46%	84,51%
28.	Sulawesi Tenggara	36,75%	75,07%
29.	Gorontalo	31,23%	60,89%
30.	Sulawesi Barat	34,91%	62,99%
31.	Maluku	36,48%	65,62%
32.	Maluku utara	37,53%	75,85%
33.	Papua Barat	28,87%	59,84

Sumber Data: Data Diolah dari Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung

Tabel 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa dari 33 Provinsi, Lampung termasuk urutan Literasi Keuangan ke-31 dan Inklusi Keuangan ke-30, sehingga dapat dilihat kurangnya literasi dan inklusi keuangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Dalam mengimplementasikan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat.



Otoritas Jasa Keuangan bersama lembaga jasa keuangan berusaha mendekatkan masyarakat salah satunya dengan melalui Layanan Keuangan mikro. Program ini juga termasuk sebagai salah satu strategi literasi keuangan yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga jasa keuangan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan Latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan”.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Maka peneliti memfokuskan peran OJK dalam hal sebagai berikut.

1. Peneliti akan fokus pada peran yang dilakukan OJK dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah Karyawan OJK.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan?
2. Bagaimana Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan?
3. Bagaimana Peran OJK dalam Perspektif Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji. Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian harapannya, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mengenai Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
2. Bagi Akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.
3. Bagi Penulis penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya yang ingin mengetahui tentang peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan”.

Titik Ulfatun, Umi Syafa'atul Udhma, dan Rina Sari Dewi pada tahun 2014 jurnal Ekonomi Islam dengan judul “*Analisis*

*Tingkat Literasi Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2014*". Penelitian menunjukkan bahwa Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan responden sebesar 57% atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah.<sup>10</sup>

Faridhatun Faidah jurnal Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh Literasi Keuangan dan Demografi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa" bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi minat investasi mahasiswa secara positif signifikan.<sup>11</sup>

Hisashi Tarora, Ratna Juwita jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi" bahwa Literasi keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan investasi pada nasabah asuransi Generali Indonesia Cabang Palembang".<sup>12</sup>

Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal, jurnal Ekonomi pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha kecil di Kalimantan Timur" bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi terhadap kinerja usaha kecil di provinsi Kalimantan Timur dan pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Kalimantan Timur.<sup>13</sup>

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Titik Ulfatun, dkk.yang hanya fokus

---

<sup>10</sup>Ulfatun, Titik, dkk., "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014," *Jurnal Pelita*, Vol. XI No. 2 (2016): 1-13.

<sup>11</sup>F. Faridhatun, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Demografi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa," *Journal of Applied Business and Economic*, Vol. 5 No. 3 (2019): 251-26.

<sup>12</sup>Hisashi Tarora, Ratna Juwita, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi," *Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam*, (2016): 1-9.

<sup>13</sup>Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha kecil di Kalimantan Timur," *Jurnal Ekonomi*, Vol 15 No. 1 (2019): 48-59.

terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya literasi keuangan tetapi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam penelitian Faridhatun dan Hishashi Tarora menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam penelitian Poppy Alvianolita S, Dkk. dan Wiro Iko Putri menggunakan metode kuantitatif.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) maka dimana peneliti ini adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilibatkan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga pemerintah.<sup>15</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dengan peranan dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 129.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.<sup>16</sup> Metode deksriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Lampung. Dimana Narasumber yang dimaksud adalah karyawan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Data Sekunder yaitu data diperoleh dari kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>17</sup> Teknik observasi dengan cara penelitian melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang peran (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan

---

<sup>16</sup>Mudjarat Kuncono, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi 4, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), 12.

<sup>17</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dengan pimpinan dan karyawan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penelitian akan dilaksanakan di Kantor Provinsi Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Way Sekampung No.9 Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>19</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan peran (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup> Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

---

<sup>18</sup>Esterberg, *Metode Penelitian Kombinasi*. (Dalam Buku Sugiyono, 2002),

<sup>19</sup>*Ibid.*, 326.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 13.

dalam mengelola data yang telah di dapatkan dari penelitian yang dilakukan dilapangan adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diredaksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>21</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya penyajian data. Analisis data atau penyajian data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data, berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>22</sup> Penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, melaksanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conculasion Drawing/Vervication*

*Conculasion Drawing/Vervication* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum jelas, dapat berupa hubungan klausal/interaktif, hipotesis atau teori.<sup>23</sup> Setelah data yang terkumpul diolah, selanjutnya melakukan interprestasi data dan menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 336.

<sup>22</sup>Fenti Hikmawat, *Metodelogi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 88.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 34.



peristiwa khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, sehingga diperoleh data dari hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini tidak hanya menyatukan pengawasan tetapi juga bagi perbankan, pasar modal dan industri keuangan bukan bank (INKB). Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, Reksa Dana, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun dan Asuransi.<sup>1</sup>

Arti penting OJK memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia bisnis. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, yaitu:

---

<sup>1</sup>Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga lainnya:Teori dan Apikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), 47.

- a. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, BPR, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga keuangan, Perusahaan Asuransi, Pembiayaan, Modal Ventura, pergadaian, dan penjamin baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- c. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada perbankan, Pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- d. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dewan komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- e. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dengan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik didalam maupun diluar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

- g. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Edukasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan.
- i. Produk/layanan jasa keuangan adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan konsumen/ masyarakat.

## **2. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar :<sup>2</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **3. Peran Otoritas Jasa Keuangan**

Peran Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>3</sup> Selain itu, undang –undang ini juga mengatur mengenai kewenangan di bidang edukasi dan

---

<sup>2</sup>Dr. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 266.

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, 2-3.

perlindungan konsumen yang dapat dikatakan baru pertama kali peraturan perundang-undangan di bidang keuangan mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 28-31 Undang – undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

- 1) Memberikan informasi dan edukasi
- 2) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat
- 3) Melakukan pelayanan pengaduan konsumen
- 4) Melakukan pembelaan hukum
- 5) Mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen

#### **4. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sepak terjang ojk sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air. Posisi OJK dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia , sangatlah strategis. OJK memiliki senjata yang ampuh untuk mengatur menegakkan dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Adapun nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:<sup>4</sup>

- a. Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan berkomitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- b. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 272.

- c. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
- d. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

## **B. Literasi Keuangan**

### **1. Pengertian Literasi Keuangan**

Menurut Manurung Literasi Keuangan yakni seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Mitchel Literasi Keuangan ialah bagaimana kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat keputusan untuk membuat perencanaan keuangan, akumulasi keuangan, pensiun dan hutang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi diartikan sebagai kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. OJK mengatakan hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya pengetahuan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu.<sup>6</sup>

Literasi keuangan merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini mengandung muatan-muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan. Literasi ini penting dalam sektor keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan.

---

<sup>5</sup>Manurung, Adler H. dan Riky, Lutfi T, *Succesfull Financial Planner; A Complete Guide* (Jakarta: Garsindo, 2009).

<sup>6</sup>Edukasi Literasi dan inklusi keuangan (On-line), tersedia di: <http://www.sindonews.com>. (10 Maret 2020)



Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap lembaga jasa keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. Dalam hal ini ada empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu *literacy*, *Penetration*, *density* dan *delivery*.

- a. *Literacy* merupakan perangkat utama dalam mewujudkan *financial inclusion*, tahapan ini mengandung pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami lembaga jasa keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang dilakukan oleh OJK hal ini sejalan dengan salah satu tujuan OJK sesuai dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. OJK melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi *well literatur* dalam masalah keuangan, melainkan kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk implementasi.
- b. *Penetration* merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahapan ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan.<sup>7</sup>
- c. *Density* merupakan tahap dimana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima. *Delivery* merupakan tahap dimana literasi dan inklusi keuangan sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan dapat diterima dengan baik. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan

---

<sup>7</sup>Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 102.

harus memilih jalur distribusi yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil dan murah.

## **2. Dasar Literasi**

Pondasi literasi keuangan adalah adanya temuan data Bank Dunia bahwa tingkat akses masyarakat Indonesia lembaga keuangan formal hanya sebesar 36,1% atau lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Selain itu yang menjadi alasan pentingnya literasi keuangan adalah angka rasio saving to GDP Indonesia yaitu sekitar 31%, lebih rendah dari Singapura sebesar 49%, serta China 49%.<sup>8</sup> Dan Menurut hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia termasuk Literasi dan Inklusi Keuangan yang cukup rendah yaitu tingkat Literasi sebesar 38,03% dan Inklusi keuangan sebesar 76,19%.

## **3. Tingkat Literasi Keuangan**

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat, yakni :

- a. *Well literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient Literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

---

<sup>8</sup>Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/2016 tentang Kampanye Gerakan “Ayo Menabung”.

- d. *Not literate*, Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan**

Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi keuangan faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebagai berikut :

- a. Tingkat Pendidikan  
Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat literasi keuangan orang tersebut.
- b. Strata Sosial  
Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikelompokkan atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.
- c. Kelompok Usia  
Semakin dewasa usia strata sosial masyarakat akan semakin tinggi tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat tersebut.

#### **5. Prinsip dasar literasi keuangan**

- a. Terencana dan terukur  
Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan.
- b. Berorientasi pada pencapaian  
Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
- c. Berkelanjutan  
Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan,

pelaku usaha jasa keuangan perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan.

d. Kolaborasi

Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

## **6. Tujuan Literasi Keuangan**

Menurut Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat Pasal 3, tujuan literasi keuangan meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu,
- b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

## **7. Kelompok sasaran literasi keuangan dalam SNLKI :**

- a. Pelajar atau mahasiswa dan pemuda

Pemuda merupakan generasi penerus yang akan membangun Indonesia dimasa yang akan datang. Mereka perlu dipersiapkan untuk membangun bangsa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pembangunan dan penumbuhan karakter anak yang rajin, disiplin dan tentunya hemat serta cermat dalam kehidupannya. Perlu dilakukan pembinaan kepada para pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk membentuk karakter mereka, khususnya karakter dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Peningkatan pemahaman keuangan untuk pemuda merupakan hal yang penting karena mereka menghadapi risiko dari produk dan layanan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan orangtua mereka. Selain itu, para pemuda umumnya telah

mempunyai akses keuangan dan ditawarkan produk dan layanan jasa keuangan pada usia yang masih sangat muda.

Pentingnya edukasi dan literasi keuangan sejak dini telah menjadi perhatian global. Pemimpin negara-negara G-20 dalam deklarasinya menyebutkan pentingnya para pemuda mendapatkan edukasi keuangan, memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan pentingnya disusun daftar kompetensi ini tentang keuangan untuk para pemuda.

b. Kalangan profesional

Pekerja formal dan profesional merupakan salah satu target prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan. Pekerja formal dan profesional merupakan salah satu target karena mereka banyak memiliki sumber daya yang cukup sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan mampu menggunakan sumber daya keuangannya secara efektif.

c. Karyawan

Kelompok karyawan umumnya memiliki tingkat literasi dan inklusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Selain disebabkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang umumnya lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat yang lain, kelompok karyawan dan pekerja profesional memiliki keseharian yang lebih dekat dengan dunia keuangan. Namun demikian, masih banyak kelompok karyawan yang belum menggunakan produk dan layanan keuangan secara optimal. Banyak di antara mereka yang menggunakan tabungan hanya karena pembayaran gaji dilakukan melalui perbankan dan menggunakan rekening tersebut sebulan sekali. Mereka belum mengenal instrumen keuangan yang dipergunakan untuk mengelola risiko atau instrumen investasi. Oleh karena itu, program edukasi yang berkesinambungan kepada kelompok karyawan diperlukan.

d. Tenaga kerja Indonesia dan calon TKI

Peningkatan literasi keuangan bagi para TKI dan keluarga merupakan hal yang penting karena para buruh migran dan keluarganya menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Belum meratanya pengetahuan buruh migran dan keluarganya atas lembaga keuangan formal yang menyediakn jasa pengiriman remitansi mengakibatkan buruh migran kesulitan dalam mengirimkan remitansi melalui jalur yang aman. Temuan dari studi tersebut antara lain menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh TKI dan keluarga mereka adalah terbatasnya pengetahuan mereka akan pelayanan keuangan formal. Selain itu mereka memiliki akses informasi tentang jasa/ produk keuangan, seperti pengiriman dan penerimaan remitansi, tabungan, kredit, dan asuransi yang terbatas. Data survei juga menggaris bawahi bahwa TKI dan keluarganya juga memiliki keterampilan yang terbatas dalam merencanakan dan mengelola pendapatan yang diperoleh selama bekerja diluar negeri, yang selanjutnya berpotensi menghambat mereka untuk menjalankan kegiatan yang lebih produktif setelah mereka kembali ke tanah air. Ironisnya, setelah berangkat TKI umumnya akan menggantungkan pengelolaan keuangan pada keluarganya yang akan menerima kiriman uang. Pengetahuan yang terbatas dan perencanaan keuangan yang buruk pada TKI ataupun keluarganya pada akhirnya menyebabkan penghasilan yang didapat oleh TKI selama bekerja diluar negeri tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

- e. Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
- f. Penyandang disabilitas

UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik : tuna netra , tuna rungu, tuna daksa (cacat tubuh).
- b. Penyandang cacat mental : tuna grahita (keterbelakangan mental), tuna laras (gangguan emosi dan sosial), autisme (gangguan interaksi).

c. Penyandang cacat fisik dan mental

Mereka hidup ditengah stigma yang buruk dan tidak memiliki perlindungan sosial yang baik. Hal ini diperparah dengan fasilitas publik yang kurang bersahabat bagi masyarakat difabel, termasuk layanan perbankan dan jasa keuangan. Masyarakat difabel mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadikan mereka semakin terpuruk, terutama dalam hal ekonomi.

Banyak kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam menjangkau produk dan layanan keuangan. Hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya kurang sadar mereka dengan dunia keuangan. Banyak difabel yang tidak mampu merencanakan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mempersiapkan hari tuanya. Banyak diantara mereka yang tidak mengerti hak dan kewajiban mereka ketika berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Ini semua terkait dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat difabel yang umumnya juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

g. Pensiunan

Dengan jumlah penduduk senior yang sangat tinggi, literasi keuangan untuk mereka menjadi hal yang sangat penting.

h. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga

Dengan umlah yang mencapai hampir setengah jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta, perempuan jelas merupakan *critical economic players*. Banyak keputusan ekonomi penting baik, ditingkat keluarga, tingkat perusahaan, maupun ditingkat nasional dibuat oleh perempuan. Pada kenyataan, perbedaan kondisi

menyebabkan para perempuan harus berjuang lebih keras dibandingkan laki-laki dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini menyebabkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk perempuan dan ibu rumah tangga menjadi lebih penting dan strategis.

i. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Literasi keuangan sangat penting bagi pengusaha UMKM karena literasi keuangan dapat memperdayakan UMKM tentang sumber pendanaan dan keterampilan yang akan membekali UMKM untuk menimbang pilihan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya. Literasi keuangan juga akan membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan. Sebaliknya, UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa sulit untuk membuat keputusan tentang sumber pembiayaan serta tidak siap untuk menghadapi permintaan dari potensi pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan dari pembiayaan. UMKM yang tidak mempunyai catatan keuangan yang rapi atau tidak memberikan laporan keuangan yang transparan dan tersandar akan menyulitkan bank dan investor untuk menilai risiko usaha. Peran literasi keuangan semakin penting ketika sedang mengajukan kredit lembaga keuangan, karena:

- 1) UMKM dengan tingkat literasi yang dapat mengurangi kegagalan pasar yang disebabkan oleh adanya informasi asimetri antara debitur dengan lembaga keuangan;
- 2) Kemampuan analisis keuangan yang dilengkapi dengan penyajian dan pelaporan akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menggambarkan profil keuangan mereka kepada kreditur selama proses aplikasi kredit. Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam mendapatkan pembiayaan;
- 3) UMKM yang memiliki tingkat literasi yang tinggi akan memahami pentingnya mengetahui berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai kebutuhan serta mekanisme pembayaran atau pelunasan pinjaman yang



menguntungkan. Analisis arus kas dan proyeksi keuangan serta pemahaman atas rasio keuangan dasar merupakan hal yang penting untuk pemantauan perjanjian kredit;

- 4) Literasi keuangan juga penting bagi UMKM ketika memijam dengan menggunakan aset pribadi sebagai jaminan. Penggunaan kartu kredit pribadi dan pinjaman bank atas nama pribadi untuk mendanai proyek juga membutuhkan literasi keuangan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi untuk bisnis dan rumah tangga mereka. Setiap UMKM harus menimbang risiko dan manfaat terhadap setiap pilihan keuangan mereka.

## **C. Inklusi Keuangan**

### **1. Pengertian Inklusi Keuangan**

Dalam perkembangannya, upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan dan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan serta, peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Inklusi Keuangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.<sup>9</sup>

Inklusi keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi

---

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016, Strategi Nasional Inklusif Keuangan.

masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan.<sup>10</sup> Inklusi sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Inklusi keuangan memungkinkan orang menabung untuk kebutuhan keluarga meminjam untuk mendukung bisnis, membangun bantalan terhadap keadaan darurat. Memiliki akses ke layanan keuangan merupakan langkah penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dan data baru tentang kepemilikan telepon seluler dan akses internet menunjukkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggunakan teknologi guna mencapai inklusi keuangan *universal*.<sup>11</sup>

## 2. Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan

Mewujudkan sistem keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Visi inklusif keuangan dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu:

- a. *Tujuan pertama*, memberikan akses jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.<sup>12</sup>
- b. *Tujuan kedua*, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>10</sup>Muhadjir Anwar, “*Keuangan Inklusif dan Literasi Keuangan*” (Studi pada Sentra Industri Kecil di Jawa Timur), *Jurnal Riset Ekonomi dan manajemen*, Vol.17 no. 2 (2017), 275.

<sup>11</sup>World Bank, “*Financial Inclusion*” (<https://www.org/in/new/pressrelease/2018s04/19/financial-inclusion-on-the-rise-gaps-remain-global-findex-database-shows>). 10 Maret 2020.

<sup>12</sup>Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif* (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses dan UMKM, 2014), 6-7.

- c. Tujuan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam inklusi keuangan adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- d. *Tujuan Keempat*, meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan dalam menyederhanakan akses ke lembaga jasa keuangan.<sup>13</sup>

### 3. Indikator Keuangan Inklusif

Indeks Keuangan Inklusif adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan lembaga keuangan. Menurut Sarma dalam *research of international economic relations*, Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya Indeks Keuangan Inklusi dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sistem keuangan yang inklusif, yaitu:

- a. Akses, yaitu infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan antara lain :
  - 1) Penambahan jaringan kantor,
  - 2) Penambahan jumlah agen,
  - 3) Penambahan jumlah ATM,
  - 4) Penambahan *point acces* melalui layanan digital,
  - 5) Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor,
  - 6) Penambahan kerja sama dengan pihak lain, dan,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 7.

- 7) Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi, produk dan layanan jasa keuangan.
- b. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yaitu yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.
  - c. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan). Tujuan dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - d. Kualitas yaitu kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

## **D. Lembaga Jasa Keuangan**

### **1. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan**

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang

keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>14</sup>

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan-tagihan misalnya saham, obligasi, dibanding aset riil misalnya, gedung, peralatan, dan bahan baku. Setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga jasa keuangan.

Masyarakat mengenal lembaga jasa keuangan dalam dua bentuk, yaitu: bank dan bukan bank. Kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai *agent of development*. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja namun lebih dari itu yaitu sebagai pendorong pembangunan.

## **2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan**

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut jenis-jenis lembaga jasa keuangan :

- a. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
- b. Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

---

<sup>14</sup>Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 5.

## DAFTAR RUJUKAN

### 1. Buku

- Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses dan UMKM. 2014.
- Fenti, Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Kuncono, Mudjarat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi 4. Yogyakarta: PT. gelora AksaraPratama. 2013.
- Manurung, Adler H,Riky, Lutfi T, *Succesfull Financial Planner; A Complete Guide*. Jakarta: Garsindo, 2009.
- Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi*Ct.9. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peluncuran OJK Proksi: Survei Bank Dunia. 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82/2016, Strategi Nasional Inklusif Keuangan. 2016.
- Perpres No. 82/2016: Presiden Pimpin Langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif. 16 September 2016.
- Soetiono, Kusumaningtuti S dan Cecep, Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo. 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2017.

Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/2016 tentang kampanye gerakan “ayo menabung”.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandru, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Undang-undang, No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

## **2. Jurnal**

F, Messy dan A. Akinson, *Promoting financial inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 34, *OECD Publishing*, 2013.

Faridhatun, E. Pengaruh Literasi Keuangan dan Demografi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa *Journal of Applied Business and Economic*. Vol.5. 2019.

Nusron, Wahid, *Keuangan Inklusif; Membongkar Hegemoni Keuangan OECD. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework Science, Reading Mathematics and financial literacy, PISA, OECD Publishing, Paris*. 2016.

Sanistasya Alvianolita, Poppy, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal, Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi*. Vol 15 No. 1. 2019.

Tarora, Hisashi, Ratna Juwita, Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi”. *Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam*. 2016.

Ulfatun, Titik. dkk, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014. *Jurnal Pelita* Vol. XI.No.2. 2016.

Wiro Iko Putri Yanti, Pengaruh Inklusi dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 2 No. 1. 2019.

### **3. Website**

Inklusi Keuangan

.<https://www.org/in/new/pressrelease/2018s04/19/financial-inclusion-on-the-Jakarta.com>.Diakses pada 10 Maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia .<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Di akses pada 9 Mei 2019.

Otoritas Jasa Keuangan <http://www.sindonews.com>.Diakses pada 10 Maret 2020..